

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI
TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

Darwanis

Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

Desi Dwi Mahyani

Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

ABSTRACT

This purpose of this research was to examine the effect of human resource capacity, utilization of information technology and accounting internal control toward financial reporting of local governments. The population in this study are all SKPA (Aceh Devices Unit) in Nanggroe Aceh Darussalam which amounts to 37 agencies. The data used are primary data, which derives directly from research subjects in the form of the perception of respondents with a list of how to distribute the statement in the form of questionnaires to 111 respondents. The results show that simultaneously, the capacity of human resources, utilization of information technology and accounting internal controls affect the reliability of financial reporting of local government. Partially, each independent variable influence the reliability of financial reporting of local government.

Keyword: human resources, information technology, internal controls, reliability of financial reporting.

1. PENDAHULUAN

Otonomi atau desentralisasi perlu dilakukan karena tidak ada suatu pemerintah dari suatu negara yang luas mampu secara efektif membuat kebijakan publik di segala bidang atau pun mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien di seluruh wilayah tersebut. Dengan adanya desentralisasi diharapkan beban pemerintah pusat dapat berkurang. Desentralisasi juga diharapkan akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik. Istilah keuangan disini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, yang antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengolahan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku (Nogi, 2005: 65-66).

Kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas pada Satuan Kerja Perangkat Aceh yang disingkat SKPA sangatlah diharapkan untuk dapat mengelola keuangan daerah dengan baik, agar pertanggungjawaban palaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) berjalan dengan baik pula. Pemanfaatan teknologi (penggunaan perangkat komputer) pun sangat diharapkan dalam membuat laporan keuangan, hal ini dimaksudkan

untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan keefisienan kerja pegawai pemerintah daerah sendiri.

Laporan keuangan dalam sektor publik memegang peranan penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik memiliki peranan penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik (Mahmudi, 2007;3).

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan menjalankan pengendalian akuntansi dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sedangkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah direvisi menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 yaitu pada pasal 4 mengenai azas umum pengelolaan keuangan daerah.

Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, maka laporan keuangan daerah siap untuk diaudit oleh auditor independent, selanjutnya setelah diaudit dapat didistribusikan kepada DPRD dan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Laporan keuangan publikasian yang sudah diaudit tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik bagi perencanaan periode berikutnya (Mahmudi, 2007:27).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi yang diterapkan. Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem tersebut terdapat tahap-tahap, prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun internal pemerintah daerah (Mahmudi, 2007:17).

Penelitian ini kembali menguji variabel-variabel independen yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ada perbedaan antara pengertian pelaporan keuangan (*financial reporting*) dan laporan keuangan (*financial reports*). Pelaporan keuangan yang meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat, peraturan yang berlaku termasuk PABU, dan mekanisme penyampaian informasi. Sedangkan laporan keuangan merupakan medium dalam penyampaian informasi.

Laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Berdasarkan PP No.24 Tahun 2005, laporan keuangan terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Neraca;
- c) Laporan Arus Kas;
- d) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Karakteristik kualitatif sebuah laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (PP No. 24 Tahun 2005):

- a) Relevan;

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

- b) Andal;

Keandalan adalah ciri-ciri yang memungkinkan para pemakai tergantung dan yakin kepada informasi tersebut. Keandalan berarti bahwa berdasarkan semua keadaan khusus sekitar transaksi tertentu atau kejadian. Metode yang dipilih untuk mengukur dan/atau mengungkapkan efeknya menghasilkan informasi yang mencerminkan substansi dari kejadian atau transaksi.

- c) Dapat dibandingkan;

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

- d) Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan PP No 24 Tahun 2005, keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a) Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c) Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dalam penyusunan informasi yang perlu diperhatikan adalah informasi tersebut dapat mendukung suatu keputusan, sehingga informasi yang disajikan benar-benar dapat diandalkan dan bebas dari kesalahan. Akurasi informasi keuangan dapat diidentifikasi dari rendahnya tingkat kesalahan yang akan digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Dalam kamus akuntansi menurut Syahrul dan Alfali (2000 : 6) menyatakan pengertian akurasi (*accuracy*) adalah sebagai berikut:

“Akurasi (*accuracy*) merupakan keakuratan suatu pos akuntansi (Misalnya saldo perkiraan, faktur, laporan keuangan) disebut juga *accurate resenation*. Konsep ini menunjukkan pada suatu tujuan akuntansi dimana pos tersebut benar-benar merefleksikan dan menilai sekumpulan fakta yang ada di dalamnya, termasuk seluruh implikasi ekonomi dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa penting”.

Menurut Widjayanto (1992 : 206) “Akurasi informasi adalah kecermatan, informasi yang bebas dari kesalahan adalah informasi yang tinggi akurasi”.

Pengertian diatas menjelaskan bahwa akurasi informasi akuntansi adalah meminimkan tingkat kesalahan informasi tersebut, sehingga setiap input akuntansi diperlukan bukti-bukti yang benar dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan oleh semua lini manajemen.

Sumber Daya Manusia

Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Dikatakan oleh Susanto dalam Nogi (2005 : 189) bahwa asset organisasi yang paling penting dan harus diperhatikan oleh manajemen adalah manusia (sumber daya manusia atau *human resource*). Hal ini bermuara pada kenyataan bahwa manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi, yang membuat tujuan-tujuan, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang dapat membuat sumber daya organisasi lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan organisasi.

Dalam organisasi, manajer sumber daya manusia melakukan dua fungsi utama, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operatif, menurut Gomes dalam Nogi (2005: 190). Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Karena manusialah yang mengelola organisasi, diluar manusia adalah aktiva pasif yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa intervensi kebijakan manusia lainnya. Seperti yang dinyatakan Tulus (1995 : 2) “sumber daya manusia merupakan unsur masukan (*input*) terpenting yang

bersama unsur lainnya seperti modal, mesin, dan teknologi diubah melalui proses manajemen menjadi keluaran (*output*) berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

Ada dua elemen mendasar yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan atau pekerja, karena kedua elemen ini berhubungan dengan perencanaan karier pekerja dan pada akhirnya bermuara pada kinerja organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan (Notoatmodjo: 2003).

Dari definisi diatas, diketahui bahwa kapasitas sumber daya manusia menunjang organisasi dengan karya, bakat, kreativitas dan dorongan. Betapapun sempurnanya aspek teknologi dan ekonomi, tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan-tujuan organisasi dapat dicapai.

Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI) dapat didefinisikan sebagai teknologi yang mempunyai kemampuan sedemikian rupa untuk menangkap (*capture*), menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*), menampilkan (*represent*) dan menyebarkan (*transmit*) informasi. Perkembangan TI merupakan kombinasi antara kemajuan pesat bidang ilmu komputer dan komunikasi (Peserta Khusus Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pertahanan Angkatan XXII TA 2003).

Pengembangan sistem informasi yang sesuai memerlukan perpaduan dari berbagai pengetahuan tentang sistem komputer, sistem informasi dan pengetahuan tentang bagaimana merancang dan menerapkan sebuah sistem informasi serta bagaimana memperoleh sistem komputer yang diperlukan.

Menurut Halim (2002: 113) teknologi informasi memiliki lima fungsi pokok yaitu mengumpulkan data, pengolahan data, pelaporan data, penyimpanan data dan pengiriman data. Sifat sistem informasi yang diperlukan oleh suatu organisasi terutama sangat bergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan serta jenis-jenis keputusan yang dibuat oleh pengguna informasi, yang mungkin saja mereka merupakan para manajer, personil teknis dan spesialis, atau pegawai teknis dan administrasi. Informasi umum yang diperlukan oleh manajer mengikuti pola yang berdasar pada sifat kegiatan pada suatu lapisan manajerial. Kebutuhan informasi oleh manajer cenderung bervariasi sesuai dengan lapisan hirarkinya di dalam organisasi, sebab sifat kegiatan manajerial cenderung berada pada berbagai lapisan serta dari sumber-sumber yang berbeda pula.

Pada Permendagri No. 59 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Menurut Haag dan Cummings (1998) dalam Muslichah (2002 :109) menyajikan lima kategori tugas pemrosesan informasi yang mencakup menangkap, menyampaikan, menciptakan, menyimpan dan mengkomunikasikan. Tiap tugas pemrosesan informasi tersebut menciptakan suatu sistem yang menangani tugas. Seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Kategori Pemrosesan Informasi dan Alat Teknologi Informasi

Tugas Pemrosesan Informasi	Keterangan	Alat Teknologi Informasi
Menangkap informasi	Memperoleh informasi pada titik asalnya	Teknologi input, misalnya: <i>Mouse, Keyboard, Bar Code Reader</i>
Menyampaikan informasi	Menyajikan informasi dalam bentuk yang paling berguna	Teknologi output, misalnya: <i>Screen, Printer, Speaker</i>
Menciptakan informasi	Memproses informasi untuk memperoleh informasi baru	Teknologi software, misalnya: <i>Word Processing, Payroll, Expert Sistem</i>
Mengkomunikasikan informasi	Menyampaikan informasi ke orang lain atau ke lokasi lain	Teknologi telekomunikasi, misalnya: <i>Modem, Satelit</i>

Sumber: Muslichah (2002 : 109)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari teknologi adalah penyediaan informasi untuk berbagai tujuan kegiatan manajerial dan penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam berbagai tingkat operasi di dalam organisasi.

Pengendalian Intern Akuntansi

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian intern terbagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administratif. Pengendalian intern akuntansi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Sedangkan pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001:163-164). Pengendalian akuntansi sangat penting bagi organisasi bisnis maupun organisasi pemerintah, karena salah satu tujuannya adalah untuk menyelamatkan kekayaan organisasi tersebut. Pengendalian digunakan untuk memastikan sebuah organisasi mencapai kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan informasi yang tersedia dan membandingkan hasil aktual rencana.

Mahmudi (2007) menyebutkan komponen penting yang terkait dengan pengendalian intern akuntansi antara lain sebagai berikut :

- a) Sistem dan prosedur akuntansi.

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi (pasal 98 PP Nomor 58 tahun 2005): (1) sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas; (2) sistem dan

prosedur akuntansi pengeluaran kas; (3) sistem dan prosedur akuntansi aset; dan (4) sistem dan prosedur akuntansi selain kas.

b) Otorisasi.

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal.

c) Formulir, dokumen, dan catatan.

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

d) Pemisahan tugas.

Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

Pengendalian intern akuntansi ini memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi, sejak data disimpan dalam dokumen melalui berbagai sistem pembagian kekuasaan organisasi pemerintah daerah, data keuangan diproses dalam berbagai catatan akuntansi sampai dengan informasi disajikan dalam laporan keuangan (Krismiaji: 2002).

Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Beberapa penelitian yang telah dilakukan para peneliti dibidang sistem informasi menyatakan bahwa penggunaan faktor-faktor personal sangat penting untuk memprediksi penggunaan dan adopsi teknologi (Lucas, 1981 dalam Nazar,2008). Bagaimanapun, para peneliti secara historika telah memfokuskan pada faktor-faktor personal yang relatif berubah-ubah: seperti sikap individu (sikap terhadap komputer) dan persepsi personal (seperti kegunaan persepsian dan kemudahan penggunaan persepsian).

Diakui bahwa manusia merupakan sumber daya yang paling penting. Pemanfaatan manusia sebagai sumber daya tentunya berbeda dari sumber daya yang lain. Untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia secara optimum, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangannya (Soesanto, 2001 : 150).

Kapasitas sumber daya manusia yang baik akan berdampak pada kinerja organisasi yang

baik, dan salah satu pengukuran baiknya kinerja organisasi adalah pada pelaporan keuangannya, apakah telah tersaji secara andal dan tepat waktu. Pada kenyataannya, banyak sumber daya manusia yang bekerja pada organisasi pemerintahan, khususnya pada bagian penatausahaan keuangan, kurang memahami tentang sistem akuntansi yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Sehingga, banyak program-program yang telah direncanakan tidak terealisasi dengan baik, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau bahkan tidak memiliki nilai, salah satunya informasi mengenai keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kemampuan untuk mengelola informasi secara efektif di dalam organisasi sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Informasi telah menjadi aktiva tidak berwujud, yang jika dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk meningkatkan sumber-sumber organisasi lainnya. Karena itu banyak perusahaan yang mulai mengembangkan dan memberikan perhatian khusus pada teknologi informasi sebagai sumber yang memfasilitasi pengumpulan dan penggunaan informasi secara efektif. Salah satu bentuk perhatian ini adalah penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis komputer (*software* akuntansi) untuk memperlancar arus informasi perusahaan. Demikian pula dengan organisasi pemerintah, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Nogi : 2005).

Akhir-akhir ini banyak organisasi baik organisasi bisnis maupun organisasi pemerintahan banyak membutuhkan tenaga kerja yang mampu atau paham dalam bidang teknologi informasi. Para pekerja tersebut, khususnya di bidang akuntansi atau tata usaha keuangan, diharapkan mampu mengakses dan menganalisis data keuangan, membuat laporan dan membuat keputusan dengan menggunakan paket perangkat lunak sistem informasi akuntansi (Krismiaji, 2002: 7).

Menurut Soesanto (2001: 24 & 32) komputer dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang-ulang. Komputer pun digunakan untuk kegiatan-kegiatan akuntansi, dimana mesin-mesin tersebut dapat bekerja lebih cepat, lebih ekonomis dan lebih tepat dari sistem manual. Namun, efisiensi hanya dapat dicapai jika manusia dan mesin-mesin dimasukkan dalam rencana-rencana perusahaan yang ingin diapai, rencana tersebut bisa berupa pelatihan, minat, rasa frustrasi, kemampuan dan keinginan mengembangkan karier. Yang paling penting adalah kejasama antar personil sejak awal perencanaan pemasangan komputer, dan perubahan sikap karyawan terhadap pemasangan komputer yang sering terjadi adalah perasaan cemas akan ketidakmampuan mengoperasikan komputer.

Pengendalian Intern Akuntansi dan Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

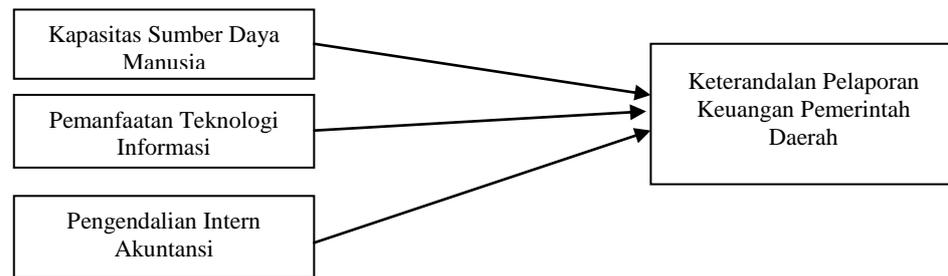
Pengendalian intern akuntansi, yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern,

meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (Mulyadi, 2001:164). Semakin banyak penggunaan sistem pengendalian akuntansi akan menyebabkan peningkatan kinerja organisasi dengan mendorong pengambilan keputusan dan pengendalian aktivitas keuangan oleh para manajer secara lebih baik.

Pada Permendagri No. 59 Tahun 2007 pasal 233 ayat (2) juga dijelaskan tentang sistem akuntansi pemerintahan daerah yang disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

Namun bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang berkompeten dalam teknologi informasi dan jujur, serta bertanggung jawab pada bidangnya, maka perusahaan tersebut akan mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan (Mulyadi, 2001 :170).

Adapun model penelitian dari penelitian ini adalah:



Gambar : Model Penelitian

Hipotesis

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan penulis dari penelitian ini adalah:

- H₁:** Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- H₂:** Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- H₃:** Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- H₄:** Pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

Populasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan pada seluruh SKPA Provinsi NAD yang terdiri dari 17 dinas, 16 lembaga teknis daerah dan 4 lembaga daerah. Populasi penelitian ini adalah seluruh kepala SKPA, kepala bagian dan staff bagian akuntansi yang berjumlah 111 responden. Penelitian dilakukan secara sensus yaitu semua anggota populasi dijadikan responden.

Tabel 2
Jumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh

Jenis SKPA	Jumlah	Responden	Total Responden
1. Dinas	17	@ 3 orang	51 orang
2. Lembaga Teknis Daerah	16	@ 3 orang	48 orang
3. Lembaga Daerah	4	@ 3 orang	12 orang
	37		111 orang

Sumber : Biro Organisasi Kantor Gubernur NAD(2007)

Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan 4 variabel yaitu keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependent (Y), sedangkan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi sebagai variabel independent (X). Operasionalisasi variabel independen dan dependen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Devinsi Operasional Variabel, Indikator dan Skala Pengukuran

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Keterandalan Pelaporan Keuangan (Y)	kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid (PP No. 24 Tahun 2005).	1.Penyajian jujur 2.Dapat diverifikasi 3.Netralitas (PP No. 24 Tahun 2005)	Interval
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X ₁)	suatu cara untuk mengendalikan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau institusi secara efektif dan efisien, dan mencakup keseluruhan aktivitas dan implementasi	1.Pendidikan 2.Pelatihan (Notoatmodjo, 2003)	Interval

	untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dimaksud (Salusu:1998 dalam Nogi:2005)		
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₂)	Teknologi Informasi (TI) dapat didefinisikan sebagai teknologi yang mempunyai kemampuan sedemikian rupa untuk menangkap (<i>capture</i>), menyimpan (<i>store</i>), mengolah (<i>process</i>), mengambil kembali (<i>retrieve</i>), menampilkan (<i>represent</i>) dan menyebarkan (<i>transmit</i>) informasi.	1.Pemanfaatan komputer 2.Penggunaan <i>software</i> akuntansi (Nogi, 2005)	Interval
Pengendalian Intern Akuntansi (X ₃)	Pengendalian intern akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi (Bastian, 2006)	1.Sistem dan prosedur akuntansi 2. Otorisasi 3. Pencatatan,dokumen, dan formulir 4. Pemisahan tugas (Mahmudi, 2007)	Interval

Metode Analisis Data

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan dinyatakan dengan model sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:	<i>Y</i>	:	Keterandalan Laporan Keuangan
	α	:	Konstanta
	$\beta_1, \beta_2, \beta_3$:	Koefisien regresi
	<i>X₁</i>	:	Kapasitas Sumber Daya Manusia
	<i>X₂</i>	:	Pemanfaatan Teknologi Infomasi
	<i>X₃</i>	:	Pengendalian Intern Akuntansi
	<i>e</i>	:	<i>error</i>

Untuk menguji bagaimana kuatnya hubungan (korelasi) diantara variabel bebas dan terikat, digunakan koefisien korelasi (r). Korelasi dapat dikatakan tinggi apabila (r) mendekati +1 atau -1, hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyana sebagai berikut:

Harga-harga r lainnya bergerak antara -1 dan +1 dengan tanda negatif menyatakan adanya korelasi tidak langsung atau korelasi negatif dan tanda positif menyatakan korelasi langsung atau korelasi positif. Khusus untuk $r = 0$, maka hendaknya ini ditafsirkan bahwa tidak terdapat hubungan linear antara variabel X dan Y nya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari jumlah kuesioner yang diedarkan kepada responden sebanyak 111 kuesioner dan pengembalian kuesioner tersebut mencapai 75%, sisanya dinyatakan tidak layak untuk digunakan sehingga populasi akhir penelitian ini berjumlah 83 (N = 83).

Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji *pearson product-moment coefficient of correlations* dengan bantuan program komputer *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) vers.15.0. Berdasarkan output komputer (lihat lampiran output SPSS, Correlations) seluruh pertanyaan dinyatakan valid karena memiliki tingkat signifikansi diatas 0,05 (5%). Sedangkan jika dilakukan secara manual maka nilai koefisien korelasi yang diperoleh untuk masing-masing pernyataan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi product moment dimana hasilnya menunjukkan bahwa semua pernyataan mempunyai nilai korelasi di atas 0,220 (lihat Tabel Nilai Kritis Korelasi r *Product-Moment* untuk N=83), sehingga pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan memiliki validitas konstruk atau dalam bahasa statistik terdapat konsistensi internal (*internal consistence*) yang berarti pernyataan-pernyataan tersebut mengukur aspek yang sama. Secara rinci diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Validitas

Item Pernyataan	Variabel	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis r (N=83)	Ket
a1	Y	0,318	0,220	Valid
a2		0,423	0,220	Valid
a3		0,686	0,220	Valid
a4		0,798	0,220	Valid
a5		0,848	0,220	Valid
a6		0,476	0,220	Valid
a7		0,426	0,220	Valid
b1	X1	0,575	0,220	Valid
b2		0,401	0,220	Valid
b3		0,669	0,220	Valid
b4		0,694	0,220	Valid
b5		0,436	0,220	Valid
b6		0,579	0,220	Valid
b7		0,640	0,220	Valid

b8		0,790	0,220	Valid
c1	X2	0,544	0,220	Valid
c2		0,511	0,220	Valid
c3		0,602	0,220	Valid
c4		0,534	0,220	Valid
c5		0,698	0,220	Valid
c6		0,597	0,220	Valid
c7		0,599	0,220	Valid
c8		0,639	0,220	Valid
d1	X3	0,637	0,220	Valid
d2		0,561	0,220	Valid
d3		0,624	0,220	Valid
d4		0,788	0,220	Valid
d5		0,458	0,220	Valid
d6		0,623	0,220	Valid
d7		0,604	0,220	Valid
d8		0,629	0,220	Valid
d9		0,466	0,220	Valid

Sumber : Data primer, diolah (2008)

Untuk pernyataan yang berhubungan dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah diperoleh nilai korelasi antara skor alternatif pilihan jawaban responden terhadap item pernyataan pertama (dilambangkan dengan **a1**) dengan total skor semua pernyataan dalam variabel tersebut sebesar 0,318. Sedangkan nilai korelasi tabel dengan $n = 83$ menunjukkan angka sebesar 0,220. Ini berarti bahwa data yang diperoleh adalah valid dan dapat dipergunakan untuk penelitian. Begitu juga halnya dengan item pernyataan lain yang terdapat dalam variabel kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi.

Hasil Uji Reliabilitas

Untuk menilai kehandalan kuesioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas berdasarkan Cronbach Alpha yang lazim digunakan dengan bantuan program komputer *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) vers. 15.0. Analisis ini digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel yang ada. Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada table berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Item	Kehandalan
1	Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,688	7	Handal
2	Kapasitas Sumber Daya Manusia	0,733	8	Handal
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,722	8	Handal
4	Pengendalian intern Akuntansi	0,723	9	Handal

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perolehan nilai *cronbach alpha* untuk variabel Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) yang terdiri dari 7 item pernyataan adalah sebesar 0,688. Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1) yang terdiri dari 8 item pertanyaan diperoleh nilai *cronbach alpha* sebesar 0,733. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) yang terdiri dari 8 item pertanyaan diperoleh nilai *cronbach alpha* sebesar 0,722 dan untuk variabel Pengendalian Intern Akuntansi (X3) yang terdiri dari 9 item

pernyataan diperoleh nilai *cronbach alpha* sebesar 0,723. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini reliabel (handal) karena nilai *cronbach alpha* dari keempat variabelnya lebih besar dari 0,6 (Sekaran, 2006:182).

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia(X1), pemanfaatan teknologi inforamsi (X2) dan pengendalian intern akuntansi (X3) terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPA provinsi NAD, baik secara simulan maupun parsial dilakukan dengan regresi linear berganda (*Multiple Linear Regression*) yang diolah dengan menggunakan SPSS vers. 15.0. secara rinci dapat dilihat pada table 4.8 berikut ini:

Tabel 6
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.570	.118		21.777	.000
	Kapasitas Sumber Daya Manusia	.139	.022	.450	6.251	.000
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.070	.027	.198	2.585	.012
	Pengendalian Intern Akuntansi	.149	.028	.414	5.383	.000

a Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Melalui program SPSS seperti yang terlihat pada tabel 4.8 tersebut, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,570 + 0,139 X_1 + 0,070 X_2 + 0,149X_3 + e$$

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Secara Simultan

Berdasarkan hasil pengujian (lihat Tabel 6) diperoleh bahwa semua koefisien regresi (β) masing-masing variabel independen tidak sama dengan nol ($\beta_1 = 0,139$, $\beta_2 = 0,070$ dan $\beta_3 = 0,149$). Dari ketentuan bahwa jika paling sedikit ada satu β_i ($i= 1,2$ dan 3) $\neq 0$, maka kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menolak H_0 (hipotesis nol) atau menerima H_A (hipotesis alternatif).

Keterandalan pelaporan keuangan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi mengenai laporan keuangan suatu instansi adalah benar atau valid. Dalam penelitian ini akan dilihat beberapa variabel yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Variabel-variabel tersebut meliputi kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa semua koefisien korelasi dari variabel yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah tidak sama dengan nol. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima. Hal ini berarti secara simultan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dan sejalan dengan hasil penelitian Indriasari dan Nahartyo(2008) yang dilakukan pada pemerintah kota Palembang dan Ogan Ilir, yang menyatakan secara simultan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Namun berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti saat melaksanakan survey lapangan, masih banyak instansi-instansi pemerintah yang dalam proses pengolahan data keuangan instansinya terdapat kendala-kendala, misalnya sumber daya manusia yang tidak berkompeten atau tidak paham bagaimana tata cara dalam membuat sebuah laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Standar Akuntansi Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Kurangnya penggunaan perangkat komputer dalam membuat laporan keuangan dan tidak digunakannya *software* akuntansi untuk memudahkan proses pembuatan laporan keuangan, atau dengan kata lain rata-rata instansi pemerintah daerah Pemerintah Aceh masih menggunakan sistem yang manual dalam proses pembuatan laporan keuangan instansinya, hal ini merupakan kendala yang memungkinkan sebuah laporan keuangan pemerintah menjadi tidak andal.

Kendala lainnya dapat dilihat dari pengendalian intern akuntansi yang sangat lemah, , dimana masih banyak dinas-dinas yang tidak lengkap dalam membuat laporannya atau tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sangat diharapkan bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Aceh untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh instansi-instansi (SKPA) yang ada di daerahnya, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap kinerja tiap-tiap SKPA khususnya dibagian keuangan, guna menciptakan akuntabilitas publik yang baik.

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hasil output menunjukkan nilai koefisien regresi dari kapasitas sumber daya manusia yaitu sebesar 0,139 ($\beta \neq 0$), maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah positif (angka koefisien regresi dari variabel kapasitas sumber daya manusia menunjukkan arah positif dengan $\beta_1 = +0,139$). Dengan

demikian perhitungan statistik ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel kapasitas sumber daya manusia berpengaruh secara positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPA provinsi NAD. Hasil penelitian ini sejalan dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo(2008) yang menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kesimpulannya adalah semakin tinggi tingkat kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas pada subbagian keuangan dari suatu instansi pemerintah daerah, maka semakin baik pula sebuah instansi menghasilkan informasi keuangan yang andal.

Hal ini dapat dilihat dimana sebagian SKPA pada provinsi NAD melakukan pelatihan yang berhubungan dengan keuangan pemerintah bagi pegawai bagian keuangan, dengan tujuan untuk menambah wawasan sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai dan kinerja instansi tersebut. Selain itu karyawan yang ada pada bidang keuangan SKPA provinsi NAD sebagian besar adalah lulusan sarjana ekonomi khususnya bidang studi akuntansi, walaupun masih ada sebagian dinas-dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah yang menggunakan tenaga kerja atau karyawan dengan lulusan selain akuntansi, bahkan masih ada pula yang karyawan yang berijazah Sekolah Menengah Atas.

Disinggung oleh Wagub Provinsi NAD melalui media massa, bahwasanya pemilihan kepala-kepala SKPA telah dilaksanakan dengan cara *fit and proper test*, namun hal ini tidak pula meningkatkan kinerja SKPA itu sendiri, bahkan sebaliknya banyak kepala-kepala SKPA yang tidak mampu merealisasikan beberapa program pembangunan yang dilihat dari realisasi dan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk tahun 2008. Padahal masyarakat sangat mengharapkan pembangunan di Aceh lebih dimaksimalkan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian terhadap variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2) diperoleh nilai koefisien regresi (β_2) sebesar 0,070, ini menunjukkan bahwa $\beta_2 \neq 0$. Dengan demikian dapat dikatakan secara parsial pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jadi, hasil penelitian ini menolak H_0 atau menerima H_A .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki korelasi positif dan berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo(2008) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusraini (2005) yang mengatakan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi pada Satuan Kerja Perangkat Aceh, maka akan meningkatkan keterandalan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Selain keterandalan hasil operasi dan kemampuan untuk mengurangi *human error*, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data diketahui memiliki keunggulan dari sisi kecepatan. Suatu entitas akuntansi pemerintah daerah, sudah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi mesti

sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tersebut akan lebih handal dan tepat waktu dalam penyampaiannya.

Hal ini dapat dilihat dimana sebagian SKPA provinsi NAD telah menyediakan komputer bagi pegawai-pegawai di instansinya, pemanfaatan teknologi informasi ini dimaksudkan untuk memudahkan pekerjaan para pegawainya sehingga dapat meningkatkan keefisienan waktu kerja pegawai.

Namun hal itu hanyalah bagi sebagian kecil saja, kenyataannya masih banyak instansi-instansi yang tidak menggunakan bahkan tidak memiliki perangkat komputer yang mencukupi di bagian keuangan pada instansinya, dan hal ini sangat menghambat proses kerja instansi dalam proses pengolahan data keuangan yang tidak sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan pemerintah yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 atau yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang harus dilaksanakan dengan tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan man faat untuk masyarakat.

Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan pengendalian intern akuntansi memiliki korelasi positif dan memiliki pengaruh. Hal ini dapat dilihat dari hasil output yang menunjukkan nilai koefisien regresi dari pengendalian intern akuntansi yaitu sebesar 0,149 ($\beta \neq 0$), dimana angka koefisien regresi dari variabel pengendalian intern akuntansi menunjukkan arah positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo(2008) yaitu pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan memperhatikan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkat sistem, kelembagaan, maupun individu, didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi yang seoptimal mungkin, dan adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai, diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik, yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang andal.

Namun kenyataannya praktek pengendalian intern akuntansi bagi sektor publik secara utuh memang sulit ditemukan dalam organisasi SKPA-SKPA yang diteliti. SKPA yang diberi kekuasaan oleh negara melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam hal kinerja fiskal dan anggaran untuk memastikan keefektifan dan keefisienan dalam mengelola asset belum menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Sebagian besar dinas-dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang melaporkan laporan keuangan yang telah dibuatnya tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, yang menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan banyak pegawai atau karyawan pada bagian keuangan yang tidak mengerti tentang sistem akuntansi berupa prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi asset dan prosedur akuntansi selain kas.

Penyimpangan dan kebocoran yang masih ditemukan di dalam laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik atau nilai informasi yaitu keterandalan. Bila dikaitkan dengan penjelasan mengenai pengendalian intern akuntansi, maka penyebab ketidakandalan sebuah laporan keuangan pemerintah daerah tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern akuntansi.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian dengan menggunakan uji regresi linier berganda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi secara simultan mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Secara parsial variabel kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap peningkatan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah
3. Secara parsial variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap peningkatan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah .
4. Secara parsial variabel pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap peningkatan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah .

Keterbatasan

Terlepas dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas sebelumnya, peneliti beranggapan bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Begitu juga dengan penelitian ini yang masih banyak memiliki keterbatasan dan kelemahan yang membatasi kesempurnaannya, antara lain :

1. Penelitian ini hanya meneliti Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) provinsi NAD, sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian dan kesimpulan apabila penelitian dilakukan menambah atau mengganti pada objek dan daerah penelitian yang berbeda.
2. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner. Kurangnya sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada, masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasanya jawaban responden. Keadaan seperti ini merupakan hal yang tidak dapat dikendalikan karena berada diluar kemampuan peneliti. Hal ini disebabkan

tidak semua responden seperti kepala instansi dan kepala subbagian keuangan yang berada di tempat ketika peneliti membagikan kuesioner penelitian.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya berikut ini:

1. Untuk menguatkan dan mendukung hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan pengujian kembali untuk melihat konsistensi penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan penelitian berikutnya. Misalnya memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dan melengkapi metoda survai dengan wawancara kepada responden.
2. Untuk penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan dapat memperluas populasi penelitian.
3. Dari hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Aceh dapat meningkatkan kinerja SKPA dengan melakukan evaluasi kerja tiap SKPA, serta dapat memberikan fasilitas yang mendukung bagi kelancaran aktivitas seluruh SKPA provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra (2006), *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul (2002), *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Yogyakarta : AMP YKPN.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo (2008), Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Simposium Nasional Akuntansi*, XII, Pontianak.
- Krismiaji, (2002), *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta : AMP YKPN.
- Mahmudi (2007), *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, Politik*, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mulyadi (2001) *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Edisi Kedua Yogyakarta : STIE YKPN.
- Mulyadi (2001), *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Jakarta : Salemba Empat.
- Muslichah (2002), Pengaruh Teknologi Informasi, Saling Ketergantungan, Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial, *Jurnal Akuntansi Petra*, Vol.4, No.2, November, Semarang, Hal. 106-125.
- Nazar, M. Rifki (2008), *Cognitive vs Personality Terhadap Niat Pengguna Teknologi (Internet)*, *Simposium Nasional Akuntansi*, XII, Pontianak.
- Nogi S., Hessel Tangkilisan (2005), *Manajemen Publik*, Jakarta : PT. Grasindo.
- Notoatmodjo, Soekidjo (2003), *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI

Vol. 2. No. 2 Juli 2009

Hal. 133-151

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sekaran, Uma (2006). *Research Methods For Business (Metodologi Penelitian Untuk Bisnis)*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Serambi Indonesia, Kamis, 21 Agustus 2008. *Kinerja SKPA Perlu Dimaksimalkan*.
- Soesanto, Slamet (2001), *Administrasi Kantor : Manajemen dan Aplikasi*, Jakarta : Djambatan.
- Syahrul, SE., Muhammad dan Alfali, Nizar, SE. (2000), *Kamus Akuntansi*, Penerbit Citra Harta Prima.
- Triana, Yenni (2004), Pengaruh Struktur Pengendalian Intern Perusahaan Terhadap Keandalan Informasi Keuangan, *Skripsi*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Tulus, Moh. Agus (1995), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Gramedia.
- Widjayanto, Nugroho (1992), *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta : Andi Offset.
- Yusraini (2005), Pengaruh Teknologi Informasi, Saling Ketergantungan, Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial, *Skripsi*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.